

‘NOUVEAU INFORMATION POOR’ DALAM PERADABAN GELOMBANG KETIGA (Fenomena Masyarakat Miskin Informasi di Kawasan Timur Indonesia)

Hikmah Tahir

(Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Ichsan Gorontalo)

ABSTRACT

Advances in information technology is characterized by its characteristics by socioeconomic status will always be a difficult problem solved. System formed then divided between those who are able to adopt the technology that can not afford as a result of the presence of this innovation.

*Related to the gap in the information society, Green (2002) termed *nouveau riche* information for people who get sudden access to ICTs eg through promotion, becoming student) and *nouveau poor* information and people who lose access to ICTs as a result of poverty or sudden change in circumstances life eg unemployment.*

To overcome this problem in eastern Indonesia, the Indonesian government has made several programs, among other programs Warung Indonesia Information and Cyber Village establishment. However, these programs are still experiencing a lot of problems, mainly related to infrastructure in the region is still minimal.

Keywords : Nouveau Information Poor, ICT, Eastern Indonesia

A. Pendahuluan

Tahun 1970-an merupakan awal dari era teknologi informasi dan masyarakat informasi yang berlangsung di Eropa dan Amerika. Toffler (Rogers.1986) menyebutnya sebagai era yang menandai peradaban manusia masuk gelombang ketiga atau disebut pula *Knowledge Age*, dimana kehidupan masyarakat sudah ‘dibentuk’ dengan teknologi satelit telekomunikasi dan kabel optik dalam jaringan internet.

Transisi menuju masyarakat informasi tidak hanya ditandai atas aktifitas manusia yang

memproduksi, mengolah dan mendistribusikan informasi, melainkan ditandai pula dengan kemunculan sejumlah problem sosial. Di Amerika dan Eropa, timbul pengangguran dalam jumlah yang besar serta terbentuknya kelas sosial (Rogers: 1986).

Pengangguran dan kelas sosial adalah dua problem sosial yang senantiasa dikemukakan para pakar komunikasi atas dampak teknologi informasi. Pengangguran terjadi karena ketimpangan yang dibingkai dalam *term* gap pengetahuan, literasi komputer dan partisipasi.

Masyarakat yang tidak berbekal keterampilan teknologi dan tidak memiliki akses untuk menguasainya menjadi komunitas yang terpinggirkan dari dunia kerja.

Terbentuknya struktur kelas dalam masyarakat yakni kelas elit dan kelas bawah merupakan wujud dari pengelompokan masyarakat yang menguasai teknologi dan yang tidak menguasai teknologi. Kesenjangan diantara keduanya cukup jauh dan tentu saja jumlah kelas bawah lebih mendominasi.

Masyarakat yang menguasai teknologi atau diistilahkan Green (2002) sebagai *nouveau information riche* akan semakin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya terhadap teknologi informasi. Sementara masyarakat yang tertinggal informasi atau *nouveau information poor* semakin termarginalkan karena visibilitas mereka yang kurang. Sehingga, mereka tidak mendapatkan layanan kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang berujung pada sulitnya meningkatkan taraf hidup.

Di Indonesia, problem sosial yang terjadi atas teknologi informasi secara garis besar sama dengan yang dialami masyarakat Eropa dan Amerika pada masa transisi tersebut, khususnya pembagian kelas sosial. Makassar contohnya, pembagian kelas sosial masyarakat tidak hanya ditandai dengan profesinya. Kelompok kelas bawah pun dikarenakan dominan dari mereka berpendidikan rendah dan sama sekali tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi.

Sementara itu, sejumlah kecil masyarakat kelas bawah yang telah terakses teknologi informasi (internet) melalui program Desa Cyber masih belum maksimal dalam memanfaatkan informasi seperti transaksi *online* hasil pertanian dan hasil laut atau layanan kesehatan dan pendidikan.

Secara luas, ketimpangan (*digital divide*) yang memunculkan masyarakat *nouveau information poor* juga dikarenakan kondisi geografis Indonesia. Meski hasil *MarkPlus Insight Netizen Survey 2012* (www.dailysocial.net) mencatat per-

tumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia 2010-2012 mencapai 61,1 juta dengan tingkat penetrasi 23,5%, namun jumlah tersebut kenyataannya lebih banyak disumbangkan oleh pengguna di pulau Jawa. Sementara tingkat penetrasi yang masih jauh dari (setidaknya) persentase 50% dikarenakan minimnya pengguna teknologi di belahan pulau lainnya terutama di kawasan timur seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua. Gambaran umum fenomena teknologi informasi di kawasan timur Indonesia khususnya Makassar menjadi contoh masih adanya problem sosial atas teknologi informasi yang perlu mendapat solusi.

B. Peradaban Gelombang Ketiga

Peradaban manusia sejak era 1970-an di Eropa dan Inggris telah memasuki abad teknologi informasi. Teknologi ini merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi komputasi seperti jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, internet, atau orang-orang yang bekerja dengan teknologi ini. Masyarakat informasi adalah bagian dari sistem tersebut.

Memaparkan tentang era masyarakat ini tidak terlepas dari dua era sebelumnya yakni agrikultur dan industri. Toffler (Rogers.1986) dalam membagi peradaban manusia, menempatkan masyarakat informasi pada gelombang ketiga dengan ciri-ciri: produksi massa yang terkonsentrasi, deurbanisasi dan globalisasi. Gelombang pertama (800 SM – 1500 SM) merupakan gelombang pembaruan dimana peradaban manusia dicirikan dengan teknologi pertanian. Gelombang kedua (1500 M – 1970 M) merupakan era masyarakat industri dengan timbulnya imperialisme dan kolonialisme yang berbudaya produk massa, komunikasi massa dan media massa.

Masyarakat informasi dapat disamakan dengan masyarakat pasca industri dimana kesejahteraan mereka bukan lagi berbasis pada tenaga industri melainkan pada proses, penge- masan, dan penggunaan data dan informasi. Pasar informasi dan manajemen mendominasi

ekonomi pasca industri, teknologi dinilai menjadi bagian penting dari komunikasi dan informasi adalah kunci penting dalam mencari kesejahteraan.

Era teknologi komunikasi di peradaban ini membuat struktur masyarakat lebih terbuka (*open society*) dimana pada umumnya anggota masyarakat berusaha dan bekerja keras untuk menaikkan statusnya di dalam masyarakat. Mereka bersaing dan bekerjasama untuk dapat naik ke lapisan teratas sesuai dengan sistem kompetisi dan korporasi yang sudah dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pada gelombang ketiga dengan ciri-cirinya yang tersebut di atas, merupakan sintesa dari gelombang pertama (*tesa*) dan gelombang kedua (*antitesa*).

C. Masyarakat Informasi

Struktur sosial masyarakat informasi terbentuk dengan karakter masyarakat jaringan, kreatif, multifungsi. Nilai yang dianut masyarakat di era ini terkait dengan kreatifitas pengetahuan yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Daniel Bell (McQuail: 2000) adalah pakar pertama yang memperkenalkan istilah masyarakat informasi karena sehubungan dengan banyak bermunculannya sektor-sektor ekonomi berbasis informasi di akhir era masyarakat industri. Berbasis dari pengistilahan Daniel Bell, McQuail mendeskripsikan masyarakat informasi sebagai :

Those that have become dependent upon complex electronic information networks and which allocate a major portion of their resources to information and communication activities (2000:121)

Dalam pandangan Mc Quail, rendahnya biaya transmisi dan distribusi informasi juga semakin mendorong pesatnya pertumbuhan industri informasi. Sensivitas terhadap jarak geografis pun terus mengalami penurunan. Volume dan interaktifitas dalam berkomunikasi juga terus mengalami peningkatan.

Pada era ini pertimbangan ekonomi, sosiologi, dan teknologi senantiasa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap informasi atau media baru. Seperti yang dikemukakan Rogers (1986) atas masyarakat informasi, "*An information society is a nation in which a majority of the labor force is composed of information workers, and in which information is the most important element*", maka karakteristik pengguna teknologi dalam hal ini yang mampu mengadopsi teknologi informasi yang paling pertama adalah status sosial ekonomi. Status ini diukur dari segi pendapatan, prestise kerja, dan yang memiliki pendidikan formal tinggi. Tipikal profesi atas masyarakat informasi dari ukuran tersebut seperti guru, *scientist*, jurnalis, *computer programmers*, konsultan, sekretaris, dan manager.

D. Problem Informasi dan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi yang ditandai dengan karakteristik penggunaannya berdasarkan status sosial ekonomi akan selalu menjadi problem yang sulit terselesaikan. Sistem yang terbentuk kemudian terbagi antara mereka yang mampu mengadopsi teknologi dengan yang tidak mampu sebagai dampak kehadiran inovasi ini.

Van Dijk membedakan empat akses atas ketimpangan antara yang mampu mengadopsi dengan yang tidak mampu mengadopsi (Van Dijk: 2000):

1. *Lack of any digital experience caused by lack of interest, computer fear and unattractiveness of the new technology ('psychological access')*
2. *No possession of computers and network connections ('material access')*
3. *Lack of digital skills caused by insufficient user-friendliness and inadequate education or social support ('skills access')*
4. *Lack of significant usage opportunities ('usage access')*.

Sementara itu, Rogers (1986) membagi tipologi dampak sosial atas teknologi, yakni:

1. Dampak positif atau negatif (*desirable impacts*) terkait dengan masalah fungsional, dimana masyarakat yang menerima hadirnya inovasi akan membuat sistem individu atau masyarakat lebih efektif.
2. Dampak langsung (*direct impacts*) dilihat dari perubahan sistem individu dan masyarakat melalui respon langsung terhadap inovasi.
3. Dampak antisipasi (*anticipated impacts*) perubahan inovasi yang dikenal dan diperuntukkan bagi anggota dalam sistem sosial.

Dari ketiga tipologi dampak ini, akan selalu muncul pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut adalah ketidakmampuan dalam mempertimbangkan lingkungan sosio-ekonomi dan politik pada saat kelompok tersebut mengimplementasikan teknologi informasi. Hal itu menghalangi anggota masyarakat tertentu untuk menggunakan dan menerimanya secara terbuka.

Ketidakmampuan adopsi teknologi tersebut pada dasarnya pun memiliki faktor-faktor terikat. Mereka yang kemudian miskin informasi selalu berkaitan erat dengan gender, usia, kelas sosial, kelompok kultur, edukasi, pendapatan, etnis, dan lokasi geografis (Green: 2002). Ini menjadi faktor yang menentukan siapa yang mampu mengakses teknologi informasi. Termasuk pula pengalaman dan keterampilan dalam mendapatkan informasi tergantung pada sosial, budaya dan personanya.

Secara garis besar, dua problem sosial yang kemudian menyertai dari ketidakmampuan mengadopsi teknologi informasi adalah pengangguran dan terbentuknya kesenjangan dalam pola struktur kelas. Rogers (1986) menggambarkan kedua problem atas transisi tersebut di masyarakat Amerika Serikat.

Transisi dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi secara massif mengeliminasi sekian banyak pekerja, khususnya di bidang industri. Selama tahun 1980-an di

Amerika Serikat, diperkirakan aktivitas yang berteknologi tinggi akan menyerap tiga juta pekerja baru, namun dengan penggunaan teknologi akan mengeliminasi 25 juta pekerja. Profesi yang cukup mendapat pukulan keras atas transisi ini adalah industri asuransi sebesar 22 persen dan perbakan sebesar 10 persen di tahun 2000. Sehingga, kedepan persyaratan dari pekerjaan yang berteknologi tinggi adalah pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi (Rogers, 1986 : 166). Pengangguran merupakan dampak langsung dari hadirnya komputer berbasis teknologi karena mampu menggantikan kerja manusia. Pengangguran kemudian bertalian langsung dengan terbentuknya struktur kelas sosial masyarakat di Amerika.

Dampak dari teknologi ini terhadap ketimpangan kelas di masyarakat Amerika adalah terbentuknya dua kelas sosial, yakni kelas tinggi (*upper class*) dan kelas sosial rendah (*lower class*) yang begitu senjang dan tidak adanya kelas menengah. Hal yang sangat berbeda dari bentuk kelas sosial di masyarakat agrikultur yang membentuk pola *diamond*, dimana kelas menengah mendominasi.

E. Nouveau Information Poor

Sebagaimana yang diungkapkan Rogers (1986) terhadap problem besar yang ditimbulkan atas transisi masyarakat di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, akses teknologi informasi menyebabkan langsung adanya struktur kelas sosial di masyarakat. Jumlah kecil pekerja informasi, khususnya mereka dengan edukasi formal tinggi, menempati struktur kelas sosial tertinggi.

Struktur kelas sosial terendah adalah mereka yang tidak berbekal keterampilan (*deskilled*) teknologi informasi. Ketimpangan atas informasi diukur dengan sejumlah faktor diantaranya; adanya gap atas informasi (hanya kelas elit yang mampu mengadopsi teknologi media baru) dan akses informasi berdasarkan gender (dalam dekade terakhir, jumlah akses informasi di Amerika didominasi oleh kaum perempuan Amerika).

Ada beberapa alasan dasar atas meluasnya gap informasi antara masyarakat yang kaya informasi (*the information rich*) dengan masyarakat miskin informasi (*the information poor*) yakni; *new media* mewakili *nontrivial cost* (hanya masyarakat elit dalam hal status sosial ekonomi yang mampu membayar), semakin berpendidikan maka semakin tinggi kepedulian terhadap pentingnya informasi dan kebutuhan informasi dan ketiga, profesi yang punya prestise seperti ilmuwan dan *engineering* adalah kunci untuk memasuki masyarakat informasi, karena secara teknis profesi tersebut lebih kompeten untuk menggunakan teknologi komunikasi.

Rice juga (1984) juga mengungkapkan sejumlah alasan mengapa *gap* informasi ini semakin meluas yang cukup memiliki kesamaan dengan pendapat Rogers. Pertama, mahalnya teknologi media baru. Masyarakat dengan status sosialekonomi yang tinggi merupakan pengadopsi pertama dari teknologi ini, kemudian disusul dengan masyarakat lainnya yang mampu. Kedua, media baru adalah perangkat informasi yang dimediasi oleh komputer, sehingga individu yang hanya memiliki motivasi pencarian informasi yang menggunakannya (mereka yang merupakan kelompok *the information rich* yang telah terliterasi). Ketiga, teknologi media baru yang menyediakan komunikasi interindividual menuntut komunikator yang potensial dalam penggunaan aplikasi seperti *email*, *teleconference*, *teletype* dan sebagainya sehingga dapat membentuk jaringan komunikasi. Keempat, *the information rich* khususnya, menginginkan informasi yang khusus, oleh karenanya, mereka meningkatkan manfaat informasi mereka.

Berkaitan dengan *gap* informasi di masyarakat, Green (2002) mengistilahkan *nouveau information riche* bagi mereka yang memiliki akses terhadap teknologi informasi (*people who get sudden access to ICTs e.g through promotion, becoming student*) dan *nouveau information poor* bagi masyarakat yang tidak memiliki atau kehilangan atau sedikit akses terhadap teknologi informasi, (*people who lose access to ICTs as a result*

of sudden poverty or change in life circumstances e.g. unemployment).

Nouveau information poor ini dicirikan dengan visibilitas yang kurang dan miskin informasi. Masyarakat dalam masa transisi tersebut menolak akses terhadap hadirnya teknologi informasi yang pada dasarnya telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sehingga, mereka tergolong kelompok yang dirugikan dan akan tertinggal semakin jauh dan semakin cepat dari golongan *nouveau information riche*. Efeknya adalah adanya kesenjangan sosial. Banyak fenomena atas kelompok *nouveau information poor* ini.

Meminjam istilah Green tersebut, penulis mengangkat fenomena masyarakat miskin informasi di Indonesia terutama di kawasan timur Indonesia. Masyarakat sub urban khususnya, adalah mereka yang hidup diantara perkembangan teknologi informasi, namun sama sekali tidak bisa mengaksesnya. Akibatnya, mereka tidak terlayani akan informasi pendidikan, kesehatan termasuk pengetahuan untuk menunjang kehidupan ekonomi mereka. Sementara itu, masih banyaknya area *blank spot* atas jaringan teknologi juga membuat masyarakat di kawasan timur ini menjadi sangat tertinggal dalam segala bidang.

F. Masyarakat Miskin Informasi di Kawasan Timur Indonesia

Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga telah mengadopsi teknologi informasi khususnya internet sejak awal 1990-an. Namun, baru dalam satu dekade terakhir atau awal 2000-an gejala menuju masyarakat informasi mulai terlihat.

Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dalam tiga tahun terakhir menurut Laporan *MarkPlus Insight Netizen Survey 2012* (www.dailysocial.net) yang mencapai 61,1 juta orang menempatkan Indonesia pada urutan ketiga setelah Cina dan India. Jumlah pengguna internet inipun dominan disumbang dari kawasan barat Indonesia, khususnya pulau Jawa. Sementara, kawasan timur Indonesia masih sibuk dengan persiapan infrastruktur jaringan yang memadai.

Kawasan timur Indonesia merupakan rangkaian wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua yang terletak di wilayah timur Indonesia. Pengkategorian kawasan ini salah satunya berdasarkan misi pengembangan akses teknologi informasi dan komunikasi atau ICT oleh pemerintah Indonesia. Ketimpangan akses informasi antara kawasan timur dan barat (pulau Jawa) telah lama menjadi problem yang dikenal dengan fenomena *digital divide*. Dalam skala makro, menyangkut tentang ketersediaan infrastruktur jaringan yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.

Di level mikro, kajian berpusat di masyarakat lokal pedalaman (pedesaan) yang ada di kawasan timur. Ketimpangan akses teknologi informasi membuahakan kelompok miskin informasi. Internet sebagai salah satu media pengelolaan pengetahuan masyarakat lokal tidak tersedia - meski itu dalam bentuk warung internet (warnet).

Kondisi yang justru miris adalah masyarakat sub urban yang dekat dengan teknologi, tetapi memiliki banyak kendala dalam mengaksesnya, termasuk karena karakter visibilitas yang kurang juga melekat di masyarakat sub urban. Masyarakat sub urban Makassar sebagai contoh, karakter tersebut diikat sejumlah faktor diantaranya edukasi dan kelas sosial.

Tingkat edukasi yang masih rendah yang bertalian dengan 'gagap' teknologi kontras dengan konsep kota teknologi informasi yang dicanangkan pemerintah kota. Kota teknologi informasi secara umum adalah suatu tempat yang komunitas penduduknya banyak yang berinteraksi dengan teknologi informasi atau internet. Teknologi ini dimanfaatkan di segala aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik.

Konsep ini tentu masih jauh pula jika ditambah lagi dengan pembagian kelas sosial masyarakat yang dikarakteristikkan dengan jenis pekerjaan. Sebagian besar masyarakat sub urban Makassar bekerja sebagai buruh, petani dan nelayan yang kemudian menjadi penyumbang untuk golongan menengah ke bawah.

Sebagain besar dari mereka sama sekali jauh dari pengetahuan teknologi, khususnya internet. Kesempatan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini untuk menerima informasi terkait pemasaran hasil pangan, hasil laut, layanan kesehatan gratis dan pendidikan menjadi tidak terwujud.

Sementara itu, Desa Cyber yang sampai saat ini masih disosialisasikan di sebagian kecil daerah sub urban pun belum secara maksimal melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah komputer di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang hadir di sejumlah desa masih belum memadai dibandingkan jumlah penduduk yang akan dilayani. (satu unit komputer digunakan secara bergantian oleh masyarakat dengan waktu yang terbatas. Mereka antri untuk belajar menggunakan internet – keterangan gambar).

Beberapa titik yang masuk dalam program Desa Cyber yakni SombaOpu, Pallangga, dan Bontonompo (<http://desacyber.wordpress.com>) merupakan area sub urban dimana rata-rata kepala keluarga sebagai petani dan ibu rumah tangga yang memproduksi berbagai macam makanan. Akses informasi yang diberikan adalah pada ide-ide untuk memproduksi *food cover* bagi ibu-ibu rumah tangga dan informasi pertanian global seperti pupuk dan penjualan hasil pertanian bagi kepala keluarga.

Pada dasarnya program Desa Cyber yang sudah berjalan sejak 2008 tersebut sebagai jawaban atas upaya mengatasi kesenjangan teknologi antara masyarakat urban dan sub urban. Apalagi, daerah-daerah yang disasar adalah daerah yang potensial untuk dikembangkan secara produktif dari sisi mata pencaharian penduduknya.

Kehadiran Desa Cyber ini tentu masih belum menjawab keseluruhan atas problem kesenjangan akses informasi. Kemajuan pengetahuan masyarakat tetap stagnan karena mereka dibatasi oleh jumlah perangkat komputer. Kondisi ini tentu berbeda dengan pengembangan RT/RW net di pulau Jawa untuk mewujudkan akses universal. Bahkan, RT/RW

net pun merupakan percontohan swadaya masyarakat akan upaya mendapatkan akses informasi.

G. Regulasi Pemerintah

Ketimpangan struktur sosial yang terbentuk di masyarakat informasi tidak sepenuhnya dibebankan pada kondisi masyarakat yang memiliki visibilitas yang kurang dengan keterikatan sejumlah faktor yang telah dipaparkan di atas. Sisi infrastruktur adalah faktor utama kesenjangan ini, dimana pemerintah bertanggung jawab penuh dalam hal pengadaannya. Ketimpangan ini terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang cukup sulit dalam meratakan sebaran teknologi informasi. Kecenderungannya kemudian timbul apa yang disebut *digital divide*.

Van Dijk (2005) mengungkapkan bahwa *digital divide* merupakan tipe baru dari ketimpangan (*inequality*) yang membentuk tipe masyarakat (*new inequalities and development of new types of society*). Masyarakat dituntut terlibat dalam masyarakat informasi dan masyarakat jaringan. Sehingga, akses terhadap teknologi menjadi sangat penting. Penekanan terhadap adopsi teknologi menurutnya adalah pergantian dari akses motivasi dan fisik menjadi akses keterampilan dan penggunaan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, penekanan adopsi ini menjadi problem serius. Kebijakan pemerintah dalam hal perkembangan teknologi informasi pun butuh regulasi yang betul-betul untuk melayani kepentingan masyarakat seperti informasi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini tentu sangat berseberangan dengan apa yang dijalankan di negara-negara yang telah mapan dalam teknologi komunikasi.

Bella Moody (1985 : 148), seorang professor telekomunikasi internasional Michigan State University menyimpulkan *review* atas teknologi komunikasi di Dunia Ketiga;

“The different contexts of communication technology have a causal texture that is tremendously important in determining the dif-

ferent effects of this technology from one situation to the next.”

Konteks yang dimaksud adalah lingkungan sosial, psikologi, politik, dan ekonomi yang mengelilingi teknologi informasi. Sistem media di negara Dunia Pertama, seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang didominasi kepemilikan swasta yang operasionalnya berorientasi profit dan peran pemerintah dalam hal regulasi terbatas. Di negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia, pemerintah berperan besar dalam mengatur operasionalisasi teknologi informasi.

Salah satu kebijakan pemerintah melalui Depkominfo yakni Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK) untuk 5.748 desa di 4.700 kecamatan di Indonesia diharapkan mampu memecahkan problem *digital divide* ini. Program PLIK ini akan menunjang rencana pemerintah untuk meningkatkan penetrasi internet mencapai 50 juta pengguna.

Selain mengurangi kesenjangan, kebijakan ini diharapkan bisa menurunkan tarif internet di wilayah timur Indonesia. Perlu diketahui bahwa biaya akses internet melalui war-net yang ada di wilayah timur masih mencapai Rp10.000 per jam. Melalui kebijakan ini setidaknya bisa menyamai harga murah yang berlaku di kawasan barat.

Kebijakan lain yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah melalui Depkominfo mengembangkan Warmasif (Warung Informasi Indonesia) yang merupakan model pengembangan *Community Access Point* (CAP). Warmasif ini dengan bentuk outlet, di mana masyarakat yang berada di suatu wilayah dapat melakukan komunikasi, akses informasi global, pemasaran melalui internet, transaksi *online* dan akses perpustakaan digital. Tujuannya mengembangkan perdagangan komoditi unggulan baik pertanian dan kelautan, melalui media elektronika serta mampu meningkatkan layanan informasi kesehatan dan pendidikan masyarakat melalui perpustakaan digital ([www. http://www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)).

Meski masih berlaku di sejumlah kota di Pulau Jawa, diharapkan lambat laun akan berlaku di kawasan timur Indonesia.

Sebab, Indonesia saat ini berupaya keras mewujudkan visi Masyarakat Informasi Indonesia 2015. Melalui kebijakan tersebut, setelah tahun 2015 Indonesia ditargetkan telah memiliki 50% daerah yang telah terhubung dengan internet dan teknologi informasi komunikasi atau ICT (*Information Communication Technology*). Jika tidak memerhatikan wilayah timur yang masih dibatasi infrastruktur, maka visi tersebut mustahil terwujud. Ketimpangan tetap akan menjadi problem yang tidak terselesaikan. Layanan akses universal yang saat ini telah dikembangkan – meski masih didominasi kota-kota di Jawa - perlu pengawasan dari pemerintah, termasuk dalam hal pembinaan kepada masyarakat.

H. Penutup

Era masyarakat informasi saat ini pada dasarnya tidak akan terlepas dari dua problem sosial yang telah dikemukakan. Persoalannya kemudian bagaimana upaya mengurangi jumlahnya (angka pengangguran dan *nouveau information poor*). Struktur sosial tetap akan terbentuk dengan kesenjangan yang begitu jauh antara mereka yang mampu mengadopsi teknologi informasi dengan yang tidak mampu mengadopsi. Meski, sudah terdapat upaya keras pemerintah dalam membuka akses teknologi

informasi, namun faktor-faktor terikat tetap harus menjadi perhatian.

Terkait dengan *digital divide* yang memunculkan kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia, isu utama yang perlu dikaji adalah kesenjangan infrastruktur dimana keberadaan serat optik menjadi tulang punggung jaringan antara kawasan timur dan barat. Jika infrastruktur teknologi informasi ini merata, maka dipastikan akan menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau *knowledge-based society*.

Jika hal tersebut terwujud, maka manfaat teknologi informasi seperti yang diharapkan pemerintah diantaranya; mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi, mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur, meningkatkan akses informasi dan pengetahuan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (*human capacity building*), dan membentuk masyarakat informasi (*knowledge-based society*) bisa teraplikasi oleh masyarakat.

Apalagi, idealnya Indonesia menuju masyarakat informasi 2015 adalah seluruh individu dapat terakses teknologi informasi dan mendapatkan manfaat atas teknologi tersebut terhadap kehidupan mereka. ■

DAFTAR PUSTAKA

Brown, John Seely and Paul Duguid. 2000. *The Social Life of Information*. President and Fellows of Harvard College.

Flew, Terry. 2005. *New Media, An Introduction*. Oxford University Press.

Green, Lelia. 2002. *Communication, Technology and Society*. Sage Publications: London

Holmes, David. 2005. *Communication Theory: Media, Technology and Society*. Sage Publication.

Jones, Steven G. 1998. *Cybersociety, Revisiting Computer Mediated Communication and Community*. Sage Publication Inc

Lin, Carolyn A, David J Atkin. 2007. *Communication Technology and Social Change: Theory and Implications*. Lawrence Erlbaum Associates: New Jersey

- McQuail, Denis. 1996. *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar, Edisi Kedua* (terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- McQuail, Denis. 2000. *McQuail's Mass Communication Theory, 4th Edition*. London: Sage Publications.
- Pavlik, John V. 1996. *New Media Technology*. Allyn and Bacon
- Rice, Ronald E. 1984. *The New Media. Communication, Research and Technology*. California: Sage Publications
- Rogers, Everett M. 1986. *Communication Technology: The New Media in Society*. The Free Press
- Vand Dijk, Jan AGM. 2005. *The Deepening Divide: in Equality in the Information Society*. Sage Publications: California.

Paper

- Jan Van Dijk. Paper '*The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon*', presented at 50th Annual Conference of the International communication Association. 2000

Situs :

- <http://www.dailysocial.net> diakses 19 Februari 2013
- <http://www.setneg.go.id> diakses 19 Februari 2013
- <http://desacyber.wordpress.com/2009/09/16/sosialisasi-program-desa-cyber-di-kabupaten-gowa-sulawesi-selatan/>, diakses 13 Februari 2013

